



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.69/M.PPN/HK/05/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINGKUP INFRASTRUKTUR ENERGI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan program pengembangan infrastruktur energi secara nasional, diantaranya adalah penyiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 khususnya pengembangan infrastruktur energi, skema pendanaan serta identifikasi permasalahan hasil-hasil pembangunan infrastruktur energi serta tindak lanjut yang diperlukan, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis lingkup infrastruktur energi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Lingkup Infrastruktur Energi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Lingkup Infrastruktur Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINGKUP INFRASTRUKTUR ENERGI.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Lingkup Infrastruktur Energi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Lingkup Infrastruktur Energi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas Kementerian/Lembaga serta lintas Pemerintahan dalam proses penyusunan perencanaan lingkup infrastruktur energi;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

**KELIMA : ...**

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Lingkup Infrastruktur Energi;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
  - c. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi strategis lingkup infrastruktur energi;
  - d. melakukan kunjungan lapangan;
  - e. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pembangunan lingkup infrastruktur energi;
  - f. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana menyiapkan, mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi strategis; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Lingkup Infrastruktur Energi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.69/M.PPN/HK/05/2018  
TANGGAL 11 MEI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS LINGKUP INFRASTRUKTUR ENERGI

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Energi, Telekomunikasi dan  
Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ricky Muhamad Ramdhan, SE, M.Sc,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Jadhie Judodiniar Ardajat, ST, M.Si,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Syamsidar Thamrin, ST, MBA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Andianto Haryoko, ST, M.Si, Kementerian  
PPN/Bappenas  
4. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
5. Rizki Sammyho Putera, ST, MPP,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Muh. Asrofi, ST, M.Sc, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
7. Jayanti Maharani, ST, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
8. Andreas Bondan Satriadi, ST, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
9. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
10. Firdini, S.Hum, MPA, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
11. Chrisnawan Anditya, ST, MT, Kementerian  
Energi dan Sumber Daya Mineral.

D. TENAGA ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. M. Holdun, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Paska Rina Tarigan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Marsono, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Adi Sastra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Suwita, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati